

## **PERANAN SEKTOR LUAR PERTANIAN TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN DI PEDESAAN BERBASIS LAHAN KERING**

**A. ROZANY NURMANAF**

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Badan Litbang, Departemen Pertanian

### **ABSTRACT**

Work opportunity and household income are two important indicators in village economic development. The purpose of analysis focuses in identifying non agricultural sector role on two indicators in dry land village area. Data from Patanas 2004 included six provinces, these are Lampung, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi and West Nusa Tenggara is the main source of information in the analysis. The results show that agricultural sector is dominant source of household income in dry land villages. High proportion in household labor force who are absorbed in agricultural sector affect to their working hours and followed by their income from that sector. Higher in household income level tend to higer in skewness level of their distribution. While, income stability relate to income source domination. In the area where agricultural sector (especially food crops) is the main source income, monthly income proportion fluctuate more. Conversely, in the area where non agricultural sector is the main source of income, monthly income proportion will be distribute and fluctuation level is lower. Non agricultural activity, generally can be done any time a whole the year.

*Key words: work opportunity, household income, non agricultural sector*

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi pedesaan merupakan bagian integral dari perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai perubahan telah terjadi, baik perkembangan sosial ekonomi pedesaan maupun perkotaan sebagai eksis strategi pembangunan yang selama ini bersifat bias perkotaan. Hal ini menyebabkan potensi perekonomian pedesaan tidak dapat didayagunakan secara maksimal. Ada dua hal yang kerap digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, yaitu kesempatan kerja dan pendapatan. Kedua hal ini saling berkaitan baik di tingkat mikro rumah tangga maupun di tingkat makro pedesaan.

Dari aspek tenaga kerja, masih dijumpai diantaranya kesempatan kerja yang belum berkembang dan produktivitas tenaga kerja di sektor ekonomi pedesaan yang rendah. Kedua indikator tersebut turut mendorong arus urbanisasi tenaga kerja muda terdidik dari desa ke kota (Speare and Harris, 1986 dan Manning, 1992). Fenomena ini didukung pula oleh lambatnya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan Suriya, 1996 dan White, 1992) atau bahkan mengalami stagnasi, sementara upah riil buruh di sektor luar pertanian terus mengalami peningkatan (Erwidodo *et al.*,1993). Rendahnya tingkat upah dan rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tidak lepas dari terbatasnya penguasaan lahan pertanian dan terbatasnya

kesempatan kerja di sektor luar pertanian (Ishikawa, 1978). Dari situasi demikian, diharapkan perkembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor luar pertanian merupakan alternatif kegiatan dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan terutama bagi para petani berlahan sempit (*small size land holding farmers*) dan petani tanpa lahan (*landless farmers*). Akan tetapi pada kenyataannya keterlibatan kelompok masyarakat tersebut sebagian besar hanya pada kegiatan-kegiatan dengan produktivitas rendah (Hart, 1986) karena tingkat keterampilan dan permodalan yang terbatas (Nurmanaf *et al.*, 2004).

Secara umum pembangunan pertanian telah meningkatkan produksi secara fisik, namun produktivitas tenaga kerja terutama di subsektor tanaman pangan selama dua dekade terakhir tidak mengalami peningkatan yang berarti (Eng, 1993). Dari beberapa kasus terjadi perubahan-perubahan bidang usaha dari sektor pertanian ke sektor luar pertanian. Hadi *et al* (2003) melaporkan kasus di desa-desa penelitian yang pada tahun 1998 berbasis pertanian seperti tanaman pangan, peternakan sapi perah dan perkebunan kopi tidak lagi dijumpai pada tahun 2003. Jenis-jenis usaha tersebut tidak lagi merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga, tapi telah digantikan oleh kegiatan-kegiatan di sektor luar pertanian, seperti usaha di sektor informal dan berburuh walaupun dengan produktivitas rendah. Kecenderungan demikian, merupakan penjelasan adanya pergeseran struktur pendapatan masyarakat di pedesaan. Dominasi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga digantikan oleh sektor di luar pertanian (Nurmanaf *et al*, 2004).

Dari berbagai studi menunjukkan, bahwa adanya perbedaan struktur perekonomian masyarakat akibat adanya perbedaan agroekosistem. Di desa-desa berbasis lahan sawah memiliki ciri-ciri yang spesifik dalam hal kesempatan kerja dan sumber-sumber pendapatan dibandingkan dengan di desa-desa berbasis lahan kering (Nurmanaf 2005). Bertolak dari temuan tersebut, yang selanjutnya dijadikan dasar asumsi, maka tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran perihal kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan dari sektor luar pertanian di pedesaan berbasis lahan kering. Diskusi dan bahasan didasarkan terutama pada data Penelitian Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Puslitbang Sosek Pertanian tahun 2004. Data mencakup 6 propinsi yang masing-masing secara sengaja dipipilh desa-desa berbasis lahan kering. Diduga desa-desa dengan agroekosistem tersebut memiliki karakteristik perekonomian yang spesifik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

## Sumber Data dan Lokasi Penelitian

Data yang dipergunakan dalam analisis berasal dari penelitian PATANAS (Panel Petani Nasional) yang dilakukan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Penelitian PATANAS merupakan penelitian jangka panjang di lokasi tertentu secara berkesinambungan sejak tahun 1994. Tahun 2004 penelitian difokuskan pada aspek kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga yang merupakan sumber data utama tulisan ini. Penelitian berlokasi di 6 propinsi, yaitu Propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Dari keenam propinsi tersebut dipilih masing-masing 4 desa dengan kriteria agroekosistem (2 desa berbasis lahan sawah dan 2 desa berbasis lahan kering). Di masing-masing desa dienumerasi sebanyak 50 rumah tangga yang dipilih secara acak. Tulisan ini menganalisis hanya pada desa-desa dengan agroekosistem lahan kering.

## Definisi dan Batasan

- *Partisipasi Angkatan Kerja Rumah Tangga (PAK)* merupakan proporsi jumlah angkatan kerja rumah tangga yang bekerja (pada kegiatan tertentu baik di sektor pertanian maupun di sektor luar pertanian) terhadap total angkatan kerja. Secara sederhana penghitungannya menggunakan formula seperti berikut:

$$PAK = \left\{ \sum_{i=1}^n (AKB)_i \right\} / \left\{ \sum_{j=1}^m (AKT)_j \right\}$$

dimana :  $(AKB)_i$  = Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja pada rumah tangga ke-i

$(AKT)_j$  = Total Angkatan Kerja pada rumah tangga ke-j

- *Curahan Waktu Kerja (CWK)* adalah proporsi waktu bekerja (yang dicurahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu di sektor pertanian dan di sektor luar pertanian) terhadap total waktu bekerja angkatan kerja rumah tangga.

$$CWK = \left\{ \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n W_{ij} \right\} / \left\{ \sum_{k=1}^p T_k \right\}$$

dimana :  $W_{ij}$  = Curahan waktu kerja kegiatan ke-i pada rumah tangga ke-j

$T_k$  = Total curahan waktu kerja pada rumah tangga ke-k

- *Proporsi Pendapatan (PP)*, merupakan persentase pendapatan yang diterima dari kegiatan tertentu di sektor pertanian dan di sektor luar pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga.

$$PP = \left\{ \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n P_{ij} \right\} / \left( \sum_{k=1}^p I_k \right)$$

dimana :  $P_{ij}$  = Pendapatan dari kegiatan ke-i pada rumah tangga ke-j.

$I_k =$  Total pendapatan rumah tangga ke-k

- *Tingkat Pendapatan (TP)* adalah rata-rata pendapatan rumah tangga per kepala.

$$TP = \left\{ \sum_{i=1}^n B_i \right\} / \left\{ \sum_{j=1}^m A_j \right\}$$

dimana :  $B_i =$  Total pendapatan rumah tangga ke-I  
 $A_j =$  Total anggota rumah tangga ke-j

- *Tingkat Stabilitas Pendapatan*, merupakan derajat fluktuasi proporsi pendapatan rumah tangga per bulan selama setahun yang diukur dengan nilai Deviasi Standar (Sd).

$$Sd = \sqrt{\left\{ \sum (X - \bar{X})^2 \right\} / (n-1)}$$

- *Derajat Ketimpangan Distribusi Pendapatan* diukur dengan nilai Indeks Gini.

Formula perhitungan seperti berikut (Szal dan Robinson, 1977).

$$IG = \left[ \left( \frac{1}{n} \right) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (y_i - y_j) \right] / (\bar{y})$$

dimana :  $IG =$  nilai Indeks Gini distribusi pendapatan  
 $n =$  total rumah tangga  
 $y_i =$  pendapatan individu rumah tangga  
 $\bar{y} =$  pendapatan rata-rata per rumah tangga

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesempatan Kerja**

Bagi angkatan kerja rumah tangga, kesempatan kerja dipengaruhi dua faktor, yaitu intern dan ekstern. Faktor intern meliputi tingkat keterampilan yang dimiliki individu angkatan kerja dan penguasaan faktor produksi selain tenaga kerja seperti lahan dan modal yang dikuasai rumah tangga. Sedangkan faktor ekstern antara lain pola produksi pertanian, sistem produksi dan jasa sektor luar pertanian, pertumbuhan angkatan kerja, mobilitas tenaga kerja baik antar sektor dan antar sub sektor maupun antar wilayah.

### **(1) Partisipasi Angkatan Kerja**

Hasil penelitian (ditampilkan pada Tabel 1) menunjukkan bahwa secara umum sektor pertanian masih mendominasi kesempatan kerja bagi angkatan kerja rumah tangga di pedesaan. Dengan perkataan lain proporsi angkatan kerja rumah tangga yang terserap pada kegiatan-kegiatan di sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan yang terserap di sektor luar pertanian. Secara

umum proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor luar pertanian didominasi oleh kegiatan usaha luar pertanian. Namun demikian di provinsi-provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Bekerja sebagai tenaga profesional merupakan jenis kegiatan yang telah berkembang di semua provinsi. Di Jawa Barat kegiatan sebagai tenaga profesional mempunyai proporsi yang relatif tinggi disusul oleh di Sulawesi Selatan. Sementara di provinsi-provinsi lain hanya dalam proporsi yang kecil. Selanjutnya, proporsi angkatan kerja yang bekerja pada kegiatan berburuh di sektor luar pertanian lebih tinggi di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung. Diduga, kecenderungan demikian erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian masing-masing provinsi khususnya kegiatan masyarakat. Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan kesempatan kerja yang relatif tinggi khususnya di sektor luar pertanian.

Tabel 1. Persentase Angkatan Kerja Rumah Tangga Menurut Jenis Kegiatan per Sektor di Pedesaan Berbasis Lahan Kering, 2004

Provinsi	Sektor Pertanian	Sektor Luar Pertanian			
		Usaha luar pertanian	Profe-sional	Buruh luar pertanian	Total
Lampung	<b>84.7</b>	7.8	2.7	4.8	<b>15.3</b>
Jawa Barat	<b>57.6</b>	22.9	13.8	5.7	<b>42.4</b>
Jawa Tengah	<b>4.9</b> <b>54.9</b>	23.7	2.9	18.5	<b>45.1</b>
Jawa Timur	<b>86.7</b>	9.5	2.9	0.9	<b>13.3</b>
Sulawesi Selatan	<b>73.8</b>	16.0	9.3	0.9	<b>26.2</b>
Nusa Tenggara Barat	<b>90.9</b>	5.8	2.2	1.1	<b>9.1</b>

Sumber: Data Primer Lapangan 2004

## (2). Curahan Waktu Kerja

Besarnya proporsi individu angkatan kerja yang bekerja tidak selalu diikuti proporsi curahan waktu kerja yang banyak pula. Curahan waktu kerja tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Ada jenis-jenis kegiatan yang memerlukan curahan waktu yang banyak dan kontinu, tapi sebaliknya ada pula jenis-jenis kegiatan yang memerlukan curahan waktu kerja yang terbatas (misalnya kegiatan musiman). Namun secara keseluruhan, curahan waktu kerja dari angkatan kerja yang bekerja dapat dipilah-pilah menurut alokasinya untuk masing-masing kegiatan. Hasil penelitian menurut provinsi disajikan pada Tabel 2.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bila dirinci menurut sektor, alokasi curahan waktu kerja dari masing-masing kegiatan menunjukkan pola yang berbeda dengan partisipasi angkatan kerja. Alokasi curahan waktu kerja di sektor luar pertanian lebih tinggi di provinsi-provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Sementara di Jawa Barat dan Lampung, walaupun tidak sebesar di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, tapi proporsi curahan waktu kerja mencapai lebih dari 40%. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, proporsi curahan waktu kerja di sektor luar pertanian terdapat dalam persentase yang lebih rendah.

Tabel 2. Persentase Curahan Waktu Kerja Menurut Jenis Kegiatan per Sektor di Pedesaan Berbasis Lahan Kering, 2004

Provinsi	Sektor Pertanian	Sektor Luar Pertanian			
		Usaha luar pertanian	Profe-sional	Buruh luar pertanian	Total
Lampung	<b>56.9</b>	34.1	3.2	5.8	<b>43.1</b>
Jawa Barat	<b>51.9</b>	28.5	9.5	10.1	<b>48.1</b>
Jawa Tengah	<b>37.9</b>	31.7	2.7	27.7	<b>62.1</b>
Jawa Timur	<b>72.6</b>	20.9	4.6	1.9	<b>27.4</b>
Sulawesi Selatan	<b>43.8</b>	24.4	15.2	16.6	<b>56.2</b>
Nusa Tenggara Barat	<b>73.3</b>	7.1	11.3	8.3	<b>26.7</b>

Sumber: Data primer lapangan 2004

Bila dihubungkan dengan partisipasi angkatan kerja, proporsi curahan waktu kerja di sektor luar pertanian menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan di sektor pertanian. Kecenderungan demikian dapat diartikan bahwa jenis-jenis kegiatan di sektor luar pertanian dilakukan lebih intensif. Sebagai contoh, partisipasi angkatan kerja di sektor luar pertanian di Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat masing-masing hanya 15.3% dan 9.1%, padahal proporsi curahan waktu kerja di sektor ini berturut-turut mencapai 43.1% dan 26.7%. Selanjutnya, bila dilihat lebih jauh ternyata kontribusi kegiatan usaha di luar pertanian yang lebih berperan, khususnya di provinsi-provinsi Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di ketiga provinsi tersebut masing-masing 7.8%, 9.5% dan 16.0%, sedangkan proporsi curahan waktu kerja berturut-turut sebesar 34.1%, 20.9% dan 24.4%. Berbeda dengan di provinsi-provinsi tersebut, di JawaTengah kegiatan sebagai buruh di luar pertanian yang lebih intensif dilakukan. Dari 18.5% angkatan kerja yang bekerja sebagai buruh di luar pertanian menggunakan waktu kerja mereka sebesar 27.7%.

Kecenderungan serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan, dengan 0.9% tingkat partisipasi angkatan kerja tapi menyerap 16.6% waktu kerja. Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, angkatan kerja lebih intensif bekerja sebagai tenaga profesional (masing-masing sebesar 9.3% dan 2.2% partisipasi angkatan kerja tapi 15.2% dan 11.3% proporsi curahan waktu kerja).

## **Struktur Pendapatan Rumah Tangga**

Diskusi mengenai struktur pendapatan dipilah dalam 4 aspek yang meliputi: (1) proporsi pendapatan menurut kegiatan, (2) tingkat dan struktur pendapatan, (3) stabilitas pendapatan, dan (4) distribusi pendapatan. Masing-masing aspek didiskusikan secara terpisah walaupun keterkaitan diantaranya tetap mendapat perhatian.

### **(1) Proporsi Pendapatan Menurut Kegiatan**

Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi dominan di desa-desa berbasis lahan kering di propinsi Lampung, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara, di tiga propinsi lainnya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pendapatan yang berasal dari sektor luar pertanian justru yang dominan. Diduga, perbedaan ini erat kaitannya dengan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di sektor luar pertanian. Di desa-desa berbasis lahan kering Propinsi Lampung, dan Nusa Tenggara Barat sektor luar pertanian relatif belum berkembang dan kegiatan angkatan kerja di sektor ini masih terbatas. Berbeda dengan di propinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat, di propinsi Jawa Timur secara keseluruhan sektor luar pertanian berkembang pesat, tapi di desa-desa berbasis lahan kering kontribusi pendapatan dari sektor ini masih rendah. Sebaliknya, di desa-desa lahan kering Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan kegiatan-kegiatan di sektor luar pertanian lebih berkembang dan mampu memberikan kontribusi pendapatan melebihi kegiatan-kegiatan dari sektor pertanian.

Tabel 3. Persentase Pendapatan Rumah Tangga Menurut Jenis Kegiatan per Sektor di Pedesaan Berbasis Lahan Kering, 2004

Provinsi	Sektor Pertanian	Sektor Luar Pertanian			
		Usaha luar pertanian	Profesional	Buruh luar pertanian	Total
Lampung	<b>60.4</b>	23.5	5.5	10.8	<b>39.6</b>
Jawa Barat	<b>42.9</b>	25.0	14.9	17.2	<b>57.1</b>
Jawa Tengah	<b>49.0</b>	28.1	8.3	14.6	<b>51.0</b>
Jawa Timur	<b>62.4</b>	30.8	4.2	2.6	<b>37.6</b>
Sulawesi Selatan	<b>39.7</b>	25.4	21.8	13.1	<b>60.3</b>
Nusa Tenggara Barat	<b>78.7</b>	9.6	8.1	3.6	<b>21.3</b>

Sumber: Data primer lapangan 2004

Bila dilihat lebih jauh, secara umum jenis kegiatan di sektor luar pertanian yang lebih berperan dalam pendapatan rumah tangga adalah usaha luar pertanian. Walaupun demikian, pendapatan yang berasal dari kegiatan berburuh luar pertanian juga merupakan sumber pendapatan penting, khususnya di provinsi-propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Sementara, jenis-jenis kegiatan sebagai pekerja profesional juga merupakan kegiatan yang penting dalam menyumbang pendapatan rumah tangga di provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

## (2) Tingkat dan Struktur Pendapatan

Tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan pendapatan perkepala. Besarnya pendapatan perkepala juga dihitung dengan setara beras yang menggunakan rata-rata harga beras kualitas medium setempat. Disamping itu struktur pendapatan menurut sektor juga disandingkan sebagai informasi tambahan. Hasil penelitian ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut sektor, 2004.



Propinsi dan basis agroekosistem	Pendapatan Per kapita per tahun		Sektor (%)	
	Rp 000	Setara beras (kg)	Pertanian	Non pertanian
Lampung	1770.2	669	60.4	39.6
Jawa Barat	1863.9	811	42.9	57.1
Jawa Tengah	2936.6	1046	49.0	51.0
Jawa Timur	2603.3	987	62.4	37.6
Sulawesi Selatan	1936.4	872	39.7	60.3
Nusa Tenggara Barat	1118.9	427	78.7	21.3

Sumber: Data primer lapangan 2004

Tabel 2.2. mengindikasikan adanya variasi tingkat pendapatan antar wilayah. Pendapatan per kepala di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih tinggi baik secara nominal maupun dalam setara beras dibandingkan dengan di 4 provinsi lain. Di Jawa Tengah perbandingan proporsi pendapatan dari sektor pertanian dan sektor luar pertanian relatif seimbang. Perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan lahan kering di Jawa Tengah seakan-akan seimbang antara kedua sektor tersebut. Akan tetapi di Jawa Timur perbandingan tersebut didominasi proporsi pendapatan dari sektor pertanian. Artinya, walaupun sektor luar pertanian sudah berkembang di provinsi ini tapi sumbangan sektor tersebut terhadap pendapatan masyarakat di desa-desa berbasis lahan kering masih lebih rendah dari pada sumbangan sektor luar pertanian. Sementara di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, pendapatan perkapita tidak sebesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan sektor luar pertanian yang merupakan porsi lebih besar dari pada sektor pertanian. Rupa-rupanya, sektor luar pertanian berkembang dengan baik dan sumbangan pendapatan dari sektor ini di pedesaan lahan kering Jawa Barat dan Sulawesi Selatan telah mampu melampaui sumbangan dari sektor pertanian. Selanjutnya, di Lampung dan Nusa Tenggara Barat rata-rata pendapatan rumah tangga (nominal dan setara beras) lebih rendah baik terhadap provinsi-provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun terhadap provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sektor luar pertanian di pedesaan lahan kering di Lampung dan Nusa Tenggara Barat belum berkembang seperti yang ditunjukkan oleh lebih rendahnya proporsi pendapatan yang berasal dari sektor luar pertanian.

### (3) Stabilitas Pendapatan

Stabilitas pendapatan diukur dengan mengidentifikasi fluktuasi pendapatan menurut waktu. Penelitian ini menggunakan data proporsi pendapatan per bulan selama satu tahun dan menghitung koefisien Deviasi Standar sebagai ukuran tingkat stabilitas. Makin tinggi nilai koefisien Deviasi Standar merupakan indikator makin berflutuasi proporsi pendapatan per bulan atau makin rendah tingkat stabilitas pendapatan. Secara rinci nilai koefisien Deviasi Standar per propinsi hasil penelitian di sajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Fluktuasi persentase pendapatan rumah tangga per bulan dan nilai loefisien Deviasi Standar di pedesaan berbasis lahan kering, 2004.

Bulan	Persen pendapatan per bulan menurut provinsi 1)					
	Lampung	Jabar	Jateng	Jatim	Sulsel	NTB
Januari 04	6,79	12,46	5,94	6,76	5,45	4,93
Februari	6,29	10,83	6,42	13,54	5,11	7,05
Maret 04	7,48	10,04	8,34	9,51	6,23	11,85
April 03	5,67	7,44	5,41	6,34	6,14	13,56
Mei	6,38	7,63	6,26	7,92	12,44	4,42
Juni	7,68	5,79	10,03	5,82	11,39	6,97
Juli	5,76	7,29	8,93	5,47	7,89	9,77
Agustus	6,80	8,23	6,67	6,45	12,68	18,61
September	9,39	7,44	6,05	7,00	8,93	9,69
Oktober	13,06	7,52	9,41	9,50	11,02	6,36
Nopember	13,41	6,64	18,94	8,61	7,10	3,91
Desember 03	11,29	8,69	7,50	13,08	5,62	2,88
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dev.Std	5,64	1,60	3,84	3,14	3,68	8,19

1) Persen pendapatan per bulan dihitung selama 1 tahun dari April 2003 s/d Maret 2004  
 Sumber: Data primer lapangan 2004

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan fluktuasi persen pendapatan rumah tangga per bulan dari masing-masing provinsi. Porsi pendapatan rumah tangga per bulan di provinsi Nusa Tenggara Barat sangat fluktuatif yang ditunjukkan oleh tingginya nilai Koefisien Deviasi Standar. Pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian di provinsi ini didominasi oleh sumber pendapatan dari sektor pertanian yang bersifat musiman. Artinya, pendapatan yang diterima lebih besar hanya pada saat-saat tertentu yaitu saat panen hasil pertanian. Sedangkan pendapatan dari sektor luar pertanian yang tidak terkait dengan musim, cenderung lebih terdistribusi sepanjang tahun. Sehingga secara keseluruhan fluktuasi porsi pendapatan rumah tangga di Nusa Tenggara Barat lebih fluktuatif. Kecenderungan serupa juga terjadi di provinsi

Lampung dengan sumber pendapatan dari sektor pertanian yang dominan dan memiliki porsi pendapatan yang fluktuatif.

Sementara di provinsi-provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan pendapatan dari sektor luar pertanian yang tinggi, porsi pendapatan kurang berfluktuasi yang ditunjukkan oleh angka koefisien Deviasi Standar yang tidak setinggi di Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Akan tetapi, berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di provinsi Jawa Barat dengan sumber pendapatan dari luar pertanian yang dominan menjadikan porsi pendapatan perbulan relatif terdistribusi dengan baik. Angka koefisien Deviasi Standar porsi pendapatan di Jawa Barat jauh lebih rendah.

#### (4). Distribusi Pendapatan

Selain tingkat pendapatan, distribusi pendapatan sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi yang merata. Malahan beberapa kasus penelitian justru menunjukkan hubungan sebaliknya. Di wilayah-wilayah dengan tingkat pendapatan yang tinggi dijumpai ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula. Pengukuran derajat ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini digunakan Indeks Gini dan penyebaran rumah tangga berdasarkan klas persentase pendapatan. Derajat ketimpangan dikategorikan tinggi bila nilai Indeks Gini lebih besar dari 0.5. Hasil penelitian yang dirinci menurut propinsi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Berbasis Lahan Kering, 2004.

Propinsi dan basis agroekosistem	% Kumulatif pendapatan terendah				Indeks Gini
	20%	40%	60%	80%	
Lampung	4.07	13.05	28.71	53.09	0.468
Jawa Barat	3.49	11.68	25.20	46.65	0.467
Jawa Tengah	3.82	11.67	24.39	46.25	0.493
Jawa Timur	1.41	4.89	13.57	31.11	0.573
Sulawesi Selatan	3.65	13.26	29.43	55.05	0.452
Nusa Tenggara Barat	2.55	12.32	27.31	49.86	0.423

Sumber: Data primer lapangan 2004

Secara umum, bila dihubungkan antara Tabel 6 dan 4 dapat diketahui bahwa di desa-desa berbasis lahan kering di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi ternyata juga memiliki derajat ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi. Masing-masing hanya sebesar 46,25 persen dan 31,11 persen pendapatan dikuasai oleh 80 persen rumah tangga di pedesaan lahan kering di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di propinsi-propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan tingkat pendapatan tidak sebesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi memiliki derajat ketimpangan distribusi pendapatan justru lebih rendah. Masing-masing sebesar 49,86 persen dan 55,05 persen pendapatan dikuasai oleh 80 persen rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Sektor pertanian masih merupakan sektor penting dalam perekonomian rumah tangga di pedesaan yang berbasis lahan kering. Tingginya porsi angkatan kerja rumah tangga yang bekerja pada kegiatan di sektor pertanian di pedesaan berbasis lahan kering, cenderung semakin tinggi pula porsi curahan tenaga pada sektor tersebut. Selanjutnya semakin tinggi pula pendapatan yang diterima dari sektor yang sama. Sementara itu, tingkat pendapatan yang diukur dengan pendapatan per kepala cenderung berkorelasi positif dengan Indeks Gini sebagai ukuran derajat ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan cenderung semakin timpang distribusinya diantara rumah tangga.

Dalam hal stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan. Di desa-desa di mana sektor pertanian lebih dominan sebagai sumber pendapatan, porsi pendapatan per bulan cenderung lebih fluktuatif. Sumber pendapatan dari kegiatan pertanian, khususnya tanaman pangan bersifat musiman dan menghasilkan pendapatan hanya saat-saat panen. Sebaliknya, di desa-desa di mana sektor luar pertanian lebih dominan sebagai sumber pendapatan porsi pendapatan rumah tangga per bulan lebih terdistribusi dengan derajat fluktuasi yang rendah. Jenis-jenis kegiatan sebagai sumber pendapatan yang berasal dari sektor luar pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eng, P. van der. 1993. *Agricultural Growth in Indonesia Since 1880. Productivity Change and the Impact of Government Policy*. Universiteit Sdraulkerij, Groningen.
- Erwidodo, M.Syukur, B. Rachman, G.S. Hardono. 1993. *Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah di Sektor Pertanian*. Monograph. Puslit Sosek Pertanian, Bogor.
- Hadi, P.U., R.N. Suhaeti, A. Djulin dan T.B. Purwantini. 2003. *Analisis Dinamika Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor.
- Hart, G. 1986. *Power, Labour and Livehood: Process of Change in Rural Java*. University of California Press. Berkley.
- Ishikawa, S. 1978. *Labour Absorption in Asian Agriculture: An Issues Paper*. Asian Employment Programs, ILO-ARTEP Publication, Bangkok.
- Kutrtz, N.R. 1993. *Introduction To Social Statistics*. International Student Edition. McGraw-Hill Book Company, Tokyo Japan.
- Manning, C. 1992. Survey of Recent Development. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. No. 28(1). Indonesian Project. The Australian National University.
- Manning, C. and J. Suriya. 1996. Survey of Recent Development. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. No. 32(1). Indonesian Project. The Australian National University.
- Nurmanaf, A.R., A. Djulin, H. Supriadi, Sugiarto, Supadi, N.K. Agustin, J.F. Sinuraya dan G.S. Budhi. 2004. *Panel Petani Nasional (Patanas): Analisis Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Nurmanaf, A.R. 2005. *Analisis Kesempatan Kerja dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan*. Makalah Belum Dipublikasikan. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Speare Jr, A. and J. Harris. 1996. Education, Farmings and Migration in Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*, No. 34(1). The University of Chicago Press, Illinois.
- Szal, R. and S. Robinson. 1977. *Measuring Income Inequality*. Dalam: Frank, G.R. dan R.C. Webb (Eds.). *Income Distribution and Growth in Less Developed Countries*. The Bookings Institution. Pp 491-533.
- White, B. 1992. *Population, Innovation and Employment in Rural Java*. In Harris, J. (Ed). *Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*. Ruthdge London.

